

LEMBAGA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SEKTOR SWASTA (LPK – PSS) – PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) UNTUK PROVINSI SULAWESI TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR, MALUKU DAN MALUKU UTARA

Pendahuluan

Salah satu upaya dan strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tertinggal yang terkena konflik dan bencana alam adalah melalui *Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)*/Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA), yang merupakan program inisiatif dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta didukung oleh Bank Dunia. Fokus kegiatannya pada penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam memperbaiki iklim usaha, peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah, strategi pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan ekonomi.

Sektor swasta menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi sangat strategis yang mampu memberikan kontribusi tidak sedikit bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pelaku-pelaku ekonomi merupakan aktor-aktor handal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kebijakan pemerintah dengan memberikan "kebebasan" untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam bentuk kebijakan otonomi menjadikan pelaku di sektor swasta menjadi sangat penting peranannya. Diharapkan dengan peran sektor ini pada gilirannya akan membantu menekan angka kemiskinan terutama penduduk di daerah tertinggal/kantong-kantong kemiskinan.

Pengembangan Sektor Swasta merupakan salah satu komponen kegiatan P2DTK dalam rangka menunjang percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, jaringan pemasaran, sumberdaya manusia, akses terhadap modal, dan regulasi ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya diperlukan suatu program yang fokus dan mengarah pada pemecahan masalah. *Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)* merupakan program inisiatif untuk menjawab persoalan-persoalan di atas khususnya pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang terkena konflik dan bencana alam.

Dilatarbelakangi pengalaman, kapasitas dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin/marjinal, Bina Swadaya Konsultan (BSK) dipercaya oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Lembaga Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sektor Swasta (LPK-PSS) di wilayah Provinsi NTT, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Diharapkan dengan pekerjaan yang diemban selama 30 bulan ini (Juli 2008 – Desember 2010), BSK akan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan sektor swasta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tujuan

Tujuan program ini terbagi menjadi dua hal, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membangkitkan kembali iklim investasi dan membentuk iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi di daerah masing-masing
2. Mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menjalankan dan meningkatkan iklim usaha dan investasi di setiap kabupaten

3. Mendukung perubahan iklim usaha dan investasi yang lebih baik dengan mengembangkan mekanisme dialog, kerjasama antar sektor swasta dan pemerintah daerah serta menciptakan regulasi yang dapat memperbaiki iklim usaha dan investasi
4. Pemulihan kondisi pelayanan usaha yang berorientasi pasar melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kapasitas sektor swasta dan pemerintah daerah
5. Memfasilitasi terbentuknya dan berjalannya wadah diskusi Forum Sektor Swasta (FSS)

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan LPK-PSS adalah pendekatan partisipatif, terpadu, dan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan keterlibatan sektor swasta dan peningkatan kualitas kuantitas sarana pendukung kegiatan ekonomi.

Sasaran dan Lokasi Program

Sasaran kegiatan program pengembangan sektor swasta adalah para pelaku usaha yang ada di daerah sasaran program, yakni Provinsi Sulawesi Tengah (4 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (6 kabupaten), Maluku (5 kabupaten), dan Maluku Utara (5 kabupaten).

Tahapan Kegiatan

Implementasi program pengembangan sektor swasta terbagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu 1) Sosialisasi, diseminasi dan orientasi rencana program, 2) Identifikasi masalah dan kebutuhan (baseline survey dan FGD), 3) studi kebijakan, 4) memfasilitasi MMS (Mekanisme Musyawarah Swasta), 5) memfasilitasi kegiatan dan rencana aksi FSS

Hasil yang Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program selama periode Juli 2008 sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan melalui baseline survey, FGD dan Studi Kebijakan secara umum sudah selesai dilakukan disemua kabupaten
2. Musyawarah I telah dilaksanakan di semua kabupaten. Dengan demikian FSS juga telah terbentuk di semua kabupaten. Sedangkan MSS II masih menyisakan 1 kabupaten yang belum menyelenggarakan MSS
3. Pendampingan FSS pada bulan ini terkait dengan tidaklanjut Pelatihan Penguatan FSS, yaitu advokasi kebijakan. Koordinator PSS Kabupaten mendampingi FSS dalam menyusun surat meminta waktu untuk berdialog membahas regulasi yang oleh para pelaku usaha dirasakan menghambat perkembangan usaha

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam program ini adalah sebagai pelaksana dan fasilitator dalam kegiatan 1) orientasi dan koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, 2) konsolidasi dan koordinasi tim, 3) pengumpulan data sekunder, 4) identifikasi masalah dan kebutuhan PSS-P2DTK, 5) studi kebijakan, 6) analisa data, 7) musyawarah sektor swasta I, 8) pembentukan forum sektor swasta, 9) musyawarah sektor swasta II, 10) penguatan forum sektor swasta, 11) monitoring dan evaluasi, 12) pelaporan